

DINAMIKA HUBUNGAN ISLĀM DAN PERADABAN MODERN DALAM PARADIGMA ALTERNATIVE MODERNITIES

Risa Pramita Wilda Fitria

Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia risapramitawf@gmail.com

Abstract

This research delves into a comprehensive exploration of the dynamics between Islām and modern civilization when viewed through the concept of Alternative Modernities . With the aim of deeply understanding the influence of Islām in the modern world, uncovering the challenges faced by Islām in the contemporary era, and exploring fresh ideas within Islāmic thought related to modernity. Qualitative approaches and literature research are employed to delve into the perspectives of prominent figures such as Nurcholish Madjid, Muhammad Iqbal, and Fazlur Rahman. The findings of this research document the monumental contributions of Islām in politics, economics, and science within modern civilization. However, amidst the tumult of globalization, complex challenges arise, such as controversial interpretations of religious teachings and intense debates on social issues and human rights. Within the framework of Alternative Modernities, Islām offers a perspective of modernity that is not only scientific but also reflects moral values while maintaining the authenticity of religious identity. Reforming Islāmic thought and practices, including creatively adapting to culture and harmoniously integrating religious values with the demands of modernity, become crucial elements in this discussion. This research not only provides profound insights but also enlivens the complexity of the relationship between Islām and modern civilization by recognizing cultural diversity and understanding modernity through a fresh and contextual alternative perspective.

Keywords: *Islām, Modern Civilization, Alternative Modernities.*

Abstrak

Penelitian ini berisi mengenai pemaparan mendalam tentang dinamika antara Islām dan peradaban modern jika ditinjau melalui konsep Alternative Modernities. Dengan tujuan mendalam memahami pengaruh Islām dalam dunia modern, mengungkap tantangan-tantangan yang dihadapi Islām dalam era kontemporer, dan mengeksplorasi gagasan-gagasan segar dalam pemikiran Islām terkait modernitas. Pendekatan kualitatif dan penelitian kepustakaan digunakan untuk menggali sudut pandang tokoh terkemuka seperti Nurcholish Madjid, Muhammad Iqbal, dan Fazlur Rahman. Hasil penelitian ini mencatat kontribusi monumental Islām dalam politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di dalam peradaban modern. Namun, seiring gemuruh globalisasi, muncul tantangan-tantangan kompleks seperti interpretasi kontroversial terhadap ajaran agama, serta perdebatan intens terkait isu-isu sosial dan hak asasi manusia. Dalam kerangka Alternative Modernities, Islām

menawarkan pandangan modernitas yang tidak hanya ilmiah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, sambil mempertahankan keaslian identitas agama. Reformasi pemikiran dan praktik Islām, termasuk adaptasi kreatif terhadap budaya dan integrasi harmonis antara nilai-nilai agama dan tuntutan modernitas, menjadi elemen penting dalam pembahasan ini. Penelitian ini bukan sekadar memberikan wawasan mendalam, tetapi juga menghidupkan kompleksitas hubungan antara Islām dan peradaban modern dengan mengakui keanekaragaman budaya dan memahami modernitas melalui sudut pandang alternatif yang segar dan kontekstual.

Kata kunci: *Islām, Peradaban Modern, Alternative Modernities.*

Received: 20-12-2023; accepted: 20-06-2024; published: 22-06-2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How To Cite :

fitria, risa. (2024). DINAMIKA HUBUNGAN ISLĀM DAN PERADABAN MODERN DALAM PEARADIGMA ALTERNATIVE MODERNITIES. *Mawaizh : Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 15(1), 53 - 83. <https://doi.org/10.32923/maw.v15i1.4086>

A. Pendahuluan

Munculnya peradaban sering kali dikaitkan dengan kemunculan sebuah peristiwa yang membawa pengaruh besar. Peristiwa ini bisa jadi seperti munculnya penemuan yang berpengaruh, munculnya gagasan baru, atau bahkan hadirnya tokoh-tokoh penting. Selain itu, peradaban sering kali didefinisikan sebagai sebuah zaman yang lebih maju dan lebih ber-adab dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Namun, ada juga pandangan yang mempersempit definisi peradaban hanya terbatas pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya saja tanpa mempertimbangkan bagaimana perilaku masyarakat di dalamnya. Selain pendefinisian peradaban yang bermacam-macam, muncul juga istilah penambahan kata “modern” yang digunakan untuk menggambarkan sebuah peradaban yang sangat maju dan canggih.

Banyak sekali tolak ukur yang digunakan untuk mengkategorikan zaman tersebut sudah layak atau belum jika dianggap sebagai peradaban yang modern. Tolak ukur yang digunakan tersebut juga beragam, mulai dari aspek ilmu pengetahuan dan pendidikan, teknologi, politik, ekonomi dan lain sebagainya.¹ Dalam aspek ini,

¹ Nisa Auliya dan Pujawati Pujawati, "Dampak Positif dan Negatif Globalisasi Terhadap Peran Keagamaan di Tengah Masyarakat Kontemporer," *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2, no. 2 (27 Desember 2023): 125, <https://doi.org/10.59029/int.v2i2.22>.

peradaban tidak akan pernah lepas dari agama. Hal ini dikarenakan agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sebuah peradaban, Islām merupakan salah satunya. Mulai dari kemunculannya, Islām selalu memberikan sumbangsih bagi peradaban melalui berbagai aspek. Bahkan ketika tahun 1200-an Islām yang digadag-gadag sebagai puncak keemasan peradaban Islām. Pada masa tersebut, Islām memberikan sumbangsih besar bagi peradaban dunia. Salah satunya ialah dalam bidang pengetahuan yang ditandai dengan kemunculan ilmuan-ilmuan muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dan lain sebagainya.²

Selain di bidang ilmu pengetahuan, Islām juga memberikan sumbangsih di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, keberlangsungan masa keemasan Islām yang semakin lama semakin memudar mengakibatkan Islām mengalami masa kemunduran dan modernitas didominasi oleh Barat. Sehingga banyak gagasan yang menjadikan Barat sebagai tolak ukur untuk menilai peradaban tersebut sudah layak atau belum dianggap sebagai peradaban modern. Namun, pada abad ke 20-an, muncul sebuah gagasan yang disebut sebagai konsep “Alternative Modernities “. Konsep ini menggagas penawaran terkait konsep baru untuk memahami dan mencapai modernitas.

Selain pembahasan mengenai tolak ukur serta kriteria terkait penyebutan “modern” ada pula penelitian terdahulu yang memaparkan terkait hal ini sehingga dapat menjadi gambaran lanjutan oleh Sukron Kamil yang membahas kesesuaian Islām dengan modernitas sebagai peradaban kontemporer. Islām dipandang sebagai agama yang secara alami mendorong pemikiran dan reformasi sosial, seiring dengan konsep *ishlah* (reformasi) dan *tajdid* (pembaruan). Meskipun terdapat kelompok fundamentalis Islām yang menolak modernitas, mayoritas umat Islām secara umum menerima konsep tersebut. Islām juga dianggap sesuai dengan dimensi-dimensi modernitas seperti negara bangsa, demokrasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.³

² Nova Azzahra dkk., "Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia," *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2 Februari 2024): 1765, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11913>.

³ Sukron Kamil, "Is Islam Compatible with Modernity? An Analysis of Modernity as Modern Civilization," *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (17 Desember 2020): 1, <https://doi.org/10.14421/skijic.v3i1.1467>.

Penelitian lainnya oleh Homayon Rahbaran dkk menyoroiti pandangan Ayatollah Khamenei tentang peradaban Islām modern, yang mencakup pemanfaatan semua kapasitas manusia dalam mencapai kebahagiaan dan keunggulan. Ayatollah Khamenei menekankan pentingnya adaptasi terhadap zaman dengan inisiatif baru seperti perhatian pada media dan seni modern, serta perbaikan hubungan internasional. Dalam kesimpulannya kedua penelitian tersebut menegaskan bahwasannya Islām dapat dilihat sebagai agama yang dinamis dan relevan dalam konteks peradaban modern, dengan upaya terus-menerus untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman.⁴

Objek penelitian ini adalah terkait dinamika hubungan antara Islām dan peradaban modern dalam pandangan paradigma *Alternative Modernities*. Meskipun sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai isu serupa, namun penelitian yang mendalam masih terbatas. Perhatian ini akan khusus membahas terkait hubungan Islām dan peradaban modern jika dilihat dari perspektif paradigma *Alternative Modernities*. Dalam hal ini terdapat tiga pembahasan dasar yang mendasari penelitian ini, a) mengenai pengaruh yang dimunculkan oleh agama Islām terhadap perkembangan peradaban modern itu seperti apa; b) tantangan yang dihadapi Islām pada masa modern; c) konsep *Alternative Modernities* sebagai gagasan alternatif terkait manifestasi bentuk dari modernisasi.

B. Pembahasan

Pengaruh Islām Terhadap Perkembangan Peradaban Modern

Secara etimologi, istilah “Islām” berasal dari bahasa Arab dengan akar kata “salima” (سَلِمَ), yang memiliki arti dasar keselamatan dan kedamaian. Dari akar kata ini, muncul kata kerja “aslama” (أَسْلَمَ), yang mengandung makna menyerah, patuh, tunduk, dan taat. Kata kerja “aslama” kemudian membentuk kata benda “Islām” (إِسْلَام), yang mencakup berbagai makna penting seperti keselamatan, kedamaian, ketaatan, penyerahan, dan pengabdian. Keselamatan mencerminkan tujuan akhir dari agama ini,

⁴ Homayon Rahbaran, Rashid Rekabian, dan Sirous Khandan, "COMPONENTS OF MODERN ISLAMIC CIVILIZATION IN THE THOUGHT OF AYATOLLAH KHAMENEI," *Gênero & Direito* 9, no. 2 (24 Februari 2020), <https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2020v9n2.50783>.

yaitu keselamatan dunia dan akhirat bagi para penganutnya. Kedamaian menggambarkan keadaan atau harmoni yang diupayakan dalam hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Ketaatan menunjukkan kepatuhan kepada ajaran dan perintah Allah yang diturunkan melalui Al-Quran dan Hadis. Penyerahan mengindikasikan sikap pasrah dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah, sementara pengabdian menekankan komitmen untuk melaksanakan ibadah dan amal saleh sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa “Islām” memiliki hubungan dengan kata “al-istilam” (الاستيلاء), yang berarti pencarian keselamatan atau penyerahan. Pandangan ini menekankan aspek proses dari mencari keselamatan melalui penyerahan diri kepada Allah. Lebih lanjut, istilah ini juga dapat dihubungkan dengan “al-inqiyad” (الانقياد), yang berarti mengikat diri atau mengikuti dengan penuh kepatuhan, menekankan pentingnya ketaatan yang penuh dan komprehensif dalam menjalankan ajaran Islam.⁵

Menurut Nurcholis Madjid, Islām adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “pasrah,” merujuk pada penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Swt dengan penuh kepercayaan kepada-Nya. Setiap agama yang dibawa oleh para nabi mengajarkan konsep penyerahan diri kepada Allah ini. Walaupun para nabi tersebut mungkin tidak berbahasa Arab, mereka tetap disebut Muslim dan agama mereka disebut Islām, karena mereka sendiri tunduk kepada Allah dan mengajarkan manusia untuk melakukan hal yang sama. Secara istilah, Islām merupakan agama yang berakar dari wahyu Tuhan, Allah Swt, dan bukan berasal dari manusia atau Nabi Muhammad Saw. Fungsi Nabi Muhammad Saw dalam Islām adalah sebagai pesan Tuhan untuk menyebarkan ajaran Islām kepada manusia.⁶

Dalam bahasa Inggris “civilization” digunakan untuk merujuk kepada tahap dari kemajuan masyarakat manusia, di mana mencapai tingkat budaya, ilmu pengetahuan, industri, dan pemerintahan yang tinggi. Definisi lain yang serupa juga menjelaskan bahwa peradaban disebut sebagai kenyamanan dan kemudahan modern, yang dimungkinkan oleh sains dan teknologi. Dalam bahasa Arab peradaban disebut

⁵ Abuddin Nata, *Studi Islam komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 12.

⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 64–65.

hadhārah yang berarti daerah perkotaan.⁷ Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, peradaban diartikan sebagai kemajuan. Kata tersebut berasal dari “adab,” yang berarti kesopanan, kesantunan, dan tata krama yang baik, digabungkan dengan awalan “per-” dan akhiran “-an.” Gabungan ini menghasilkan makna kemajuan (kecerdasan, budaya) baik secara eksternal maupun internal, serta hal-hal yang berkaitan dengan etiket, bahasa, dan budaya suatu bangsa.⁸

Samuel P. Huntington mengemukakan pendapatnya terkait peradaban. Beliau mengartikan peradaban sebagai “the highest cultural grouping of people and the broadest level of cultural identity people have short of that which distinguishes humans from other species”, di mana peradaban merupakan sebuah kelompok sosial tertinggi dari manusia dan identitas budaya terluas yang dimiliki manusia yang membedakan manusia dari spesies lain. Peradaban terdiri dari elemen objektif serupa, termasuk bahasa, sejarah, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, serta identifikasi subjektif dari setiap individu.⁹ Dalam artian yang sama, peradaban dapat merujuk pada “kemajuan pemikiran, tata krama, atau rasa yang lebih baik.” Istilah ini juga digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan keseluruhan atau tingkat pencapaian manusia serta penyebarannya, seperti dalam istilah peradaban manusia atau peradaban global.¹⁰

Dari perspektif etimologis, kata “modern” dapat diinterpretasikan dalam dua cara. Pertama, itu berarti “baru” atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, dalam konteks ini, kata “modern” menggambarkan sesuatu yang dianggap baru dan tidak pernah dianggap usang, sehingga tetap relevan sepanjang waktu. Oleh karena itu, “modern” juga mengandung makna progresif atau dinamis. Dalam bahasa Inggris, kata modern diterjemahkan sebagai *to modernize* dan *modernization*. “To modernize” merupakan kata kerja yang berarti menjadikan sesuai dengan penggunaan modern, atau untuk memenuhi kebutuhan atau tuntunan zaman saat ini. Hal ini

⁷ Effat al Sharqawi, *Filsafat Kehidupan Islam* (Bandung: Pustaka, 1986), 53.

⁸ Iskandar Engku, Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islami* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 197-98.

⁹ Mumtazinur, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2019), 69.

¹⁰ M. Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 34.

mencakup pembuatan sesuatu baru yang dapat digunakan atau menciptakan sesuatu yang dibutuhkan dalam konteks masa kini.¹¹ Sehingga peradaban modern dapat diartikan sebagai penggambaran transformasi menuju keadaan yang beradab atau berkembang dari segala aspek, termasuk sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menentukan apakah suatu peradaban dapat dikategorikan sebagai modern atau tidak, para ahli memiliki pandangan dan kriteria yang berbeda dari berbagai aspek. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan dalam menetapkan periodisasi peradaban, termasuk dalam sejarah peradaban Islām. Menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi tiga periode utama: periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik (650 M - 1250 M) sering dianggap sebagai masa keemasan Islam, ditandai oleh perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Pada fase awal periode klasik, ekspansi besar-besaran Islam terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dengan Kekhalifahan Rashidun, Umayyah, dan Abbasiyah berperan penting dalam penyebaran Islam serta pengembangan administrasi dan kebudayaan. Kota Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Fase kedua periode klasik menyaksikan kontribusi besar para ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan Muslim, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, dalam berbagai disiplin ilmu. Periode pertengahan (1250 M - 1800 M) dimulai dengan invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 M, menandai berakhirnya kejayaan Abbasiyah. Meskipun demikian, banyak cendekiawan Muslim melarikan diri ke wilayah lain dan terus menyebarkan ilmu pengetahuan. Pada periode ini, muncul kesultanan besar seperti Kesultanan Mamluk di Mesir, Kesultanan Delhi di India, serta Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman), Safawiyah di Persia, dan Mughal di India, yang mendominasi dunia Islam. Meskipun menghadapi banyak tantangan, periode ini juga ditandai oleh integrasi budaya dan pertukaran ilmu pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa, yang berkontribusi pada Renaisans di Eropa.¹²

¹¹ Samuel P. Huntington, *The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order* (New York: Simon & Schuster, 1996), 43.

¹² Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 13.

Periode modern (1800 M - saat ini) ditandai oleh pengaruh kuat Barat dan tantangan terhadap tradisi Islam. Pada masa ini, banyak wilayah Muslim jatuh di bawah kekuasaan kolonial Eropa, yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan politik dunia Islam. Sebagai respons terhadap modernitas dan kolonialisme, muncul berbagai gerakan pembaharuan dalam Islam dengan tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida yang berusaha mengharmonisasikan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Setelah Perang Dunia II, banyak negara Muslim memperoleh kemerdekaan dan membentuk negara-bangsa, dengan nasionalisme dan modernisasi menjadi agenda utama. Saat ini, dunia Islam menghadapi tantangan globalisasi, ekstremisme, dan isu-isu sosial ekonomi, namun juga menyaksikan kebangkitan kesadaran Islam dan upaya untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk masalah-masalah kontemporer. Pembagian ini memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika perkembangan Islam dari masa klasik hingga era modern.¹³ Gustav von Grunebaum juga mengelompokkan sejarah peradaban Islām ke dalam tiga periode: periode klasik (600-1258 M), periode pertengahan (1258-1800 M), dan periode modern (sejak 1800 M). Umumnya, periode setelah abad ke-19 disebut sebagai periode modern dalam studi sejarah Islām. Dalam konteks ini, istilah “modern” digunakan sebagai kata sifat yang menunjukkan rentang waktu yang mengikuti periode klasik dan pertengahan. Jadi, “Islām Modern” mengacu pada fenomena historis yang terjadi sejak tahun 1800 hingga saat ini. Para peneliti sejarah Islām umumnya melihat tiga periode ini sebagai masa kemajuan pesat (klasik), masa stagnasi (pertengahan), dan masa kebangkitan kembali (modern). Jika menggambarkan perubahan dalam sejarah Islām sebagai sebuah kurva, maka periode modern mewakili fase kebangkitan yang signifikan.¹⁴

Jika melihat definisi di atas terkait peradaban modern Islām, maka Islām memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap peradaban modern. Hal ini mengacu pada beberapa aspek diantaranya:

1. Politik

¹³ Ibid.

¹⁴ Hasan Asari, *Sejarah Islam Modern: Agama Dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX* (Medan: Perdana Publishing, 2019), 14.

Secara etimologi, kata “politik” berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana kata dasar “polis” (πόλις) berarti kota atau negara kota, yang merupakan unit pemerintahan terkecil dan penting dalam struktur sosial dan politik Yunani kuno. Dari kata “polis,” berkembang berbagai istilah lain yang terkait, seperti “polities” (πολίτης) yang berarti warga negara, mengacu pada individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara kota. Istilah “politikos” (πολιτικός) merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan pemerintahan kota. Kemudian, “politike tehne” (πολιτική τέχνη) berarti kemahiran atau seni dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur urusan publik. Selain itu, “politik epistem” (πολιτική ἐπιστήμη) berarti ilmu politik, yaitu studi tentang prinsip-prinsip dan praktik-praktik pemerintahan serta hubungan antarwarga negara dalam suatu negara. Dengan demikian, secara etimologi, politik berakar dari konsep pemerintahan kota-kota kecil Yunani, yang kemudian berkembang menjadi gagasan tentang kewarganegaraan, seni pemerintahan, dan ilmu politik secara lebih umum.¹⁵ Pada masa itu, perkembangan politik dipahami sebagai proses interaksi antara individu-individu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemikiran politik pada era tersebut sangat dipengaruhi oleh para filsuf seperti Plato dan Aristoteles, yang memandang politik sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat politik (polity) yang ideal.¹⁶ Menurut Hassan al-Banna, politik mencakup pemikiran tentang masalah internal yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti menjelaskan peran-perannya, menguraikan tugas dan hak-haknya, mengawasi penguasa untuk memastikan ketaatan saat mereka bertindak dengan baik, dan mengkritik mereka ketika melakukan kesalahan. Selain itu, politik juga mengatasi masalah eksternal umat atau masyarakat, seperti mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengarahkan bangsa menuju tujuan yang akan menempatkannya setara dengan bangsa lain, dan membebaskan dari campur tangan atau penindasan pihak asing. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan kebaikan umum atau kesejahteraan umat.¹⁷

¹⁵ Direktorat PLP Dirjen Dikdasmen Depdiknas, *KBBI* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1.

¹⁶ Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14.

¹⁷ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Tarbiyah Syiasyah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 72.

Dalam konteks Islam, istilah “politik” diidentifikasi dengan istilah “al-Siasah.” Kata “siasah” berasal dari akar kata “sasa,” yang berarti mengatur, mengelola, dan memerintah. Definisi ini sesuai dengan yang diberikan oleh kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab, yang menyatakan bahwa “siasah” dapat diartikan sebagai tata pemerintahan, politik, atau pembuatan kebijakan. Abdul Wahhab Khallaf, mengutip pendapat Al-Maqrizi, menjelaskan bahwa arti dari kata “siyasat” adalah memerintah. Dalam konteks ini, kata “sasa” setara dengan “memerintah” atau “memimpin,” sehingga “siasah” dapat dimengerti sebagai sinonim dengan “kebijakan,” baik itu kebijakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan. Secara linguistik, kata “siasah” mencakup beberapa makna, termasuk mengorganisir, mengelola, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, tata pemerintahan, dan politik. Semua makna ini merujuk pada upaya mengatur, mengelola, dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan masalah politik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam, politik tidak hanya dilihat sebagai upaya mengelola urusan duniawi, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan umat (masalah) dan menerapkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Pada awal masa Islām, politik dipegang oleh Khalifah yang merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw. Mereka memiliki kekuasaan politik dan religius yang sentral. Khalifah-khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memainkan peran penting dalam pengembangan politik awal Islām. Para Khulafa al-Rasyidin memperoleh persetujuan dan dukungan dari umat atau publik, yang serupa dengan konsep suara mayoritas rakyat dalam konteks kepala negara saat ini. Pemikir Islām seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kepemimpinan (imamah) dalam Ahlus Sunnah ditetapkan berdasarkan persetujuan umat.¹⁹ Pada periode pertengahan Islām terjadi berbagai perubahan politik dan perkembangan kekhalfahan Islām, salah satu contohnya ialah sistem kekhalfahan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Mereka menguasai wilayah yang luas,

¹⁸ Ishomuddin, "PEMAHAMAN POLITIK ISLAM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN PARTAI POLITIK BERASAS ISLAM DI MALANG RAYA," *Humanity* Volume 8, Nomor 2 (2015): 24, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2097>.

¹⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam Terj. Al-Nizam al-Siyasi Fiy al-Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2000), 152–55.

termasuk wilayah-wilayah di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Selama masa ini, terbentuk dinasti-dinasti regional seperti Bani Fatimiyah, Bani Ayyubiyah, dan Bani Mamluk. Pada saat yang sama, terjadi pula pembentukan negara-negara Muslim terpisah seperti Kesultanan Utsmaniyah, Kesultanan Mughal, dan Kesultanan Seljuk.²⁰

Pada zaman modern, politik Islām menghadapi tantangan dan perubahan signifikan. Setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada awal abad ke-20, terjadi proses terjadinya perkembangan politik negara Muslim memilih sistem politik sekuler, sementara lainnya memilih bentuk pemerintahan Islām yang beragam, seperti republik Islām, monarki Islām, atau negara berdasarkan syariah. Selama abad ke-20, terjadi berbagai gerakan politik Islām seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki, dan Revolusi Islām di Iran. Gerakan-gerakan ini mencerminkan upaya untuk menggabungkan prinsip-prinsip politik dan keagamaan dalam sistem pemerintahan. Perkembangan politik Islām pada zaman modern masih berlangsung hingga saat ini.²¹

2. Ekonomi

Istilah “ekonomi” atau “economic” dalam banyak literatur ekonomi berasal dari bahasa Yunani, khususnya “Oikos” atau “Oiku,” yang berarti manajemen rumah tangga. Hal ini mengimplikasikan bahwa ekonomi meliputi semua aspek yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Seiring perkembangannya, konsep rumah tangga tidak hanya mengacu pada sebuah keluarga dengan suami, istri, dan anak-anak tetapi juga meluas ke rumah tangga yang lebih luas seperti rumah tangga nasional, negara, dan global. Namun, definisi ekonomi Islām oleh beberapa sarjana mengacu pada ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan sumber daya terbatas dalam kerangka Syariah. Namun, definisi ini memiliki kelemahan karena dapat menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Ini karena

²⁰ Nurfazillah, "PRAKTIK POLITIK DALAM SEJARAH ISLAM ERA DINASTI-DINASTI ISLAM," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 6, no. 1 (30 Oktober 2020): 43-44, <https://doi.org/10.22373/jai.v6i1.615>.

²¹ Ali Sodiqin, "Kultur Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah," t.t., 5-10.

mendorong individu untuk terjebak dalam penilaian yang dianggap benar atau salah secara *a priori* tanpa mempertimbangkan konteks dan variasi situasional.²²

Pada masa awal Islām, ekonomi Islām berkembang seiring dengan penyebaran agama Islām. Prinsip-prinsip yang terdapat pada ekonomi Islām seperti keadilan, keadilan sosial, dan etika bisnis menjadi landasan dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi. Masyarakat Muslim dianjurkan untuk berdagang dengan jujur, menghormati kontrak, dan mematuhi hukum-hukum syariah yang terkait dengan transaksi ekonomi.²³ Pada periode pertengahan Islām, ekonomi Islām mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa kekhalifahan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan aktivitas ekonomi. Selain itu juga terdapat jaringan perdagangan yang luas yang menghubungkan wilayah-wilayah Islām dari Tiongkok hingga Eropa. Para pedagang Muslim memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan membawa masuk inovasi-inovasi seperti sistem perbankan dan instrumen keuangan yang lebih kompleks.²⁴ Beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islām dalam sistem keuangan dan regulasi mereka. Berbagai bentuk lembaga keuangan Islām seperti bank syariah, takaful (asuransi Islām), dan pasar modal sesuai syariah telah muncul. Prinsip-prinsip ekonomi Islām seperti larangan riba (bunga), larangan maysir (judi), dan keadilan dalam distribusi kekayaan tetap menjadi prinsip panduan. Selain itu, konsep-konsep ekonomi Islām seperti pembagian keuntungan (mudharabah), kemitraan (musharakah), dan keadilan sosial terus menjadi sorotan dalam diskusi ekonomi Islām modern. Gerakan ekonomi sosial Islām juga telah muncul, mengadvokasi

²² Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 14.

²³ Kharidatul Mudhiyah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik" 8, no. 2 (2015): 194–98.

²⁴ Muhammad Nurul Huda, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah," *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 2 (4 April 2021): 135–46, <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>.

pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan berdasarkan prinsip-prinsip Islām.²⁵

3. Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan adalah metode pemahaman yang dilakukan terhadap sesuatu yang ingin dipahami (ma'lum). Untuk dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, suatu hal harus menjadi alat atau perangkat yang dapat membantu manusia dalam menjalani kehidupan yang lebih mudah dan bermartabat secara relatif.²⁶ Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat periode dalam konteks ini: awal Islām, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan masa modern. Pada periode awal Islām, perkembangan ilmu pengetahuan lebih berfokus pada ilmu-ilmu syariat yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis daripada ilmu-ilmu logika. Ilmu syariat berdasarkan sumber-sumber primer Islām, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang dapat menjawab berbagai masalah yang terkait dengan ibadah dan kehidupan sehari-hari.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, disiplin baru muncul dalam bidang qira'at, yang berkaitan dengan cara membaca dan memahami isi Al-Qur'an. Selain itu, ilmu fiqh juga muncul, yang membahas masalah-masalah sehari-hari berdasarkan utama pada Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ahli Al-Qur'an juga memiliki pemahaman yang mendalam dalam fiqh. Contoh sahabat yang ahli dalam ilmu Al-Qur'an dan fiqh termasuk Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Mu'adh ibn Jabal, dan Abdullah ibn Amr ibn Ash. Selain perkembangan pengetahuan yang berasal dari teks-teks agama, pemahaman ilmu berdasarkan logika dan rasionalitas juga mulai dipertimbangkan secara serius pada saat itu. Pada periode ini, ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) mulai muncul dan berkembang pesat di kota-kota besar seperti Kufah dan Basrah, karena banyaknya penduduk yang berbahasa Persia dan kekayaan dialektika setempat. Ali ibn Abi Thalib memimpin pembinaan mengenai kaidah-kaidah dasar ilmu Nahwu kepada penduduk setempat, dan Abul Aswad Addu'ali menjadi pengumpul pertama kaidah-kaidah dasar ilmu Nahwu pada masa kepemimpinan

²⁵ Sugeng Santoso, "SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (5 Oktober 2016): 74, <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>.

²⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 74.

Umayyah. Di samping perkembangan ilmu Nahwu, kemampuan retorika yang indah dalam bahasa Arab juga tercermin dalam karya-karya sastra yang berkembang pesat pada masa itu. Kemampuan para penyair sebelum dan pada awal periode Islām juga memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia sastra selama periode ini.²⁷

Pada masa Dinasti Umayyah, selain kemajuan dalam bidang agama, filsafat juga mulai berkembang pesat di Andalusia. Salah satu pionir studi filsafat di sana adalah Muhammad Ibn Abdillah Ibn Missarah al-Bathini. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu filsafat telah ada sebelum al-Jabali dan kemudian mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan al-Nashir, mencapai puncaknya pada masa al-Mustanshir. Kemajuan dalam bidang filsafat juga memberikan dampak positif pada perkembangan pengetahuan secara keseluruhan. Pada periode tersebut, salah satu bidang studi yang populer di kalangan orang Arab adalah ilmu berdasarkan buku-buku dari India yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ibrahim al-Fazari pada tahun 771 Masehi. Melalui terjemahan tersebut, orang Arab mulai mengenali dan menggunakan angka-angka India, yang kemudian dikenal sebagai angka Arab di Eropa. Salah satu tokoh penting di Andalusia pada saat itu adalah Abu Ubaidah Muslim Ibn Ubaidah al-Balansi, seorang ahli astrologi dan matematika yang dikenal sebagai “shâhib al-Qiblat” (ahli penentu arah kiblat) di kalangan masyarakat pada masa itu. Andalusia juga memiliki sarjana-sarjana pribumi yang ahli di bidang kedokteran. Contohnya adalah Ahmad Ibn Ilyas al-Qurthubi dan al-Harrani, yang hidup pada masa pemerintahan Muhammad I Ibn Abdurrahman II al-Ausath, serta Yahya Ibn Ishaq, yang hidup pada masa pemerintahan Abdullah Ibn Mundzir dan kemudian diangkat sebagai menteri oleh al-Nashir. Andalusia juga memiliki seorang dokter bedah terkenal, Abu Qasim al-Zahrawi atau Abulcasis, yang ahli dalam bedah, penyakit telinga, dan penyakit kulit. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah “al-Tashrif li Man ‘Ajaza ‘An Ta’lif”, yang ditulis pada abad ke-12 Masehi. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa (1497), Basle (1541), dan Oxford (1778).²⁸

²⁷ A. Hasyjimy, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 64.

²⁸ S.I. Poeradisastra, *Sumbangan Islam Kepada Ilmu Dan Peradaban Modern* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat, 1986), 98–100.

Selama masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, terjadi kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama karena gerakan terjemahan yang melibatkan naskah-naskah asing, khususnya teks-teks Yunani, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Meskipun gerakan terjemahan sudah dimulai sejak masa Dinasti Umayyah, namun mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Selain naskah Yunani, terjemahan juga melibatkan sumber lain seperti teks-teks Persia, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Proses terjemahan ini melibatkan penerjemah Muslim dan non-Muslim seperti orang-orang Kristen dari Suriah dan Zoroaster dari Persia. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah adalah pendirian Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan dan observatorium. Tempat ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan berbagai naskah serta sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari Akademi Jundisaphur yang ada pada masa Kekaisaran Sasani di Persia.²⁹

Namun, perbedaan yang signifikan terjadi selama pemerintahan Harun al-Rasyid, di mana institusi Baitul Hikmah berkembang menjadi khizânah al-Hikmah, yang berfungsi sebagai pusat filsafat. Pada masa sebelumnya, seperti pada Kekaisaran Sasania di Persia, institusi serupa hanya berfokus pada penyimpanan puisi dan cerita raja-raja. Namun, di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid, fokus penggunaan institusi ini diperluas untuk mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Pada periode ini, juga terjadi perkembangan banyak aliran pemikiran dalam Islâm. Beberapa tokoh terkemuka pada masa tersebut antara lain Imam Auza'i, pendiri Mazhab Auza'i di Suriah, Imam Malik Ibn Anas yang terkenal karena karyanya yang besar dalam Hadis yang disebut al-Muwatta', Imam Syafi'i yang menyusun prinsip-prinsip Usul al-Fiqh dalam bukunya Al-Risalah, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menghimpun Hadis dalam Musnad Ibn Hanbal-nya yang berisi sekitar 30.000 riwayat Nabi.³⁰

Pada awal abad ke-20, dunia Islâm mengalami kebangkitan setelah mengalami penurunan akibat dominasi Eropa. Eropa berhasil menerapkan ilmu pengetahuan,

²⁹ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs : Rujukan Induk Dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, trans. oleh Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi (Jambi: Serambi Ilmu Semesta, 2008), 381.

³⁰ Philip K. Hitti, 381.

teknologi, dan sistem pemerintahan yang efektif, yang menyebabkan negara-negara Islām menjadi jajahan mereka. Keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan menjadi penyebab utama terjadinya penjajahan tersebut. Bagi mereka yang terpinggirkan dari proses modernisasi, pengalaman ini membuat negara mereka terasa asing. Mereka diperintah dengan hukum sekuler yang asing bagi mereka, yang tidak mereka pahami. Lebih penting lagi, penduduk lokal dari berbagai lapisan masyarakat merasa frustrasi karena mereka kehilangan kendali atas nasib mereka sendiri. Mereka merasa terputus dari akar budaya mereka dan kehilangan identitas, terutama identitas keIslāmannya. Menghadapi fenomena ini, muncul beberapa tokoh pembaharu di dunia Islām. Salah satu tokoh pertama yang mendorong perubahan adalah aktivis asal Iran, Jamaluddin al-Afghani, yang kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir Islām lainnya seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, dan banyak lainnya. Mereka berupaya untuk memperbarui pemikiran dan praktek Islām, menghadapi tantangan dari dominasi Eropa dan menafsirkan kembali nilai-nilai Islām agar sesuai dengan perkembangan zaman.³¹

Problematika yang Dihadapi Oleh Islām di Era Peradaban Modern

Di era peradaban yang semakin modern ini, setiap agama dan sistem kepercayaan banyak menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang perlu dihadapi dan dipahami dengan baik. Hal tersebut juga berlaku pada agama Islām. Problematika di era modern ini cukup banyak dan menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk diantaranya dalam aspek sosial, budaya, politik dan teknologi. Perubahan-perubahan ini lah yang telah membawa dampak yang signifikan terhadap pandangan, praktik, dan pemahaman agama Islām. Hal ini pula yang berakibat tentang bagaimana Islām menjawab tantangan-tantangan tersebut, sehingga memiliki implikasi besar bagi kehidupan umat Muslim serta interaksi mereka dengan dunia luar. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh Islām dalam era peradaban modern termasuk dampak globalisasi yang mengancam keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai Islām, interpretasi yang kontroversial atas ajaran-ajaran agama, adanya kelompok-kelompok

³¹ Abad XIX-XX, "MOTIVASI KEBANGKITAN DUNIA ISLAM PADA ABAD XIX-XX," no. 1 (2015): 45-49.

yang menganut paham ekstrimisme dan fundamentalisme serta beberapa pemikiran lain.

Istilah globalisasi mulai populer sekitar tahun 1980-an dan secara luas diterima pada tahun 1990-an. Proses globalisasi dapat dibagi menjadi tiga tahap, sebagaimana diuraikan oleh sejarawan Britania Raya, Christopher Bayly. Tahap pertama adalah globalisasi kuno, kemudian diikuti oleh proto-globalisasi yang merupakan tahap kedua yang terjadi pada abad ke-17 dan ke-18, ketika perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Hindia Timur Belanda dan Inggris menjadi perusahaan multinasional. Tahap ketiga adalah globalisasi modern yang berlangsung dari tahun 1800 hingga 1950, diikuti oleh globalisasi pasca-kolonial. Seluruh tahap ini memiliki karakteristik yang serupa, di mana globalisasi ditandai oleh kemudahan akses dalam interaksi dan komunikasi antara kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia. Tidak ada hambatan yang memisahkan interaksi tersebut.³² Globalisasi sendiri merupakan istilah yang merujuk pada fenomena integrasi internasional yang terjadi melalui pertukaran pandangan, gagasan, produk, dan aspek kebudayaan lainnya. Proses ini didorong oleh kemajuan signifikan dalam infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi seperti telegram dan internet telah mengubah cara negara-negara berinteraksi, membuat hubungan antarnegara semakin erat dan menciptakan tingkat ketergantungan yang tinggi dalam aktivitas ekonomi dan budaya. Globalisasi menghasilkan pertukaran informasi yang cepat dan luas, memungkinkan individu dan organisasi di seluruh dunia untuk terhubung dan berkolaborasi tanpa hambatan geografis yang signifikan.

Dengan adanya globalisasi, penyebaran melalui media sosial sangatlah cepat melalui media sosial. Media Sosial juga dapat menjadi sumber dakwah dan juga tukar pemikiran antar manusia. Hal yang diperbincangkan juga beragam. Meskipun demikian, dalam kemudahan akses ini terdapat beberapa dampak buruk. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk berbagi informasi tanpa melakukan verifikasi dan riset yang memadai. Hal ini dapat berakibat pada informasi palsu atau keliru tentang ajaran agama Islām dapat dengan mudah menyebar, yang pada akhirnya

³² Budi Sujati, "Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam Dunia Islam," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 100, <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.969>.

dapat menciptakan persepsi negatif dan stereotip terhadap agama tersebut. Globalisasi media sosial juga telah mempercepat penyebaran pesan yang berisi ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap umat Islām. Beberapa individu atau kelompok dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan intoleransi dan Islāmophobia. Hal tersebut dapat memperkuat pandangan negatif dan memperburuk persepsi masyarakat terhadap agama Islām secara keseluruhan. Dalam konteks globalisasi, media sosial juga dapat mempengaruhi pemahaman dan praktik terkait agama Islām. Individu dapat terpengaruh oleh nilai-nilai dan norma-norma dari budaya asing yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islām. Hal ini dapat menyebabkan pergantian atau pergeseran identitas budaya yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islām.³³

Beberapa masalah kontroversial mulai muncul dalam ranah menginterpretasikan agama Islām di era modern. Isu-isu ini meliputi isu peran perempuan dalam masyarakat, hubungan antara agama dan negara, pendidikan, kebebasan beragama, hak asasi manusia, serta interaksi dengan budaya dan nilai-nilai Barat. Salah satu kontroversi yang sering muncul adalah interpretasi terkait peran perempuan dalam masyarakat. Beberapa pemikir Islām tradisional mempertahankan pandangan bahwa perempuan harus tunduk pada peran tradisional dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan yang lain mendorong interpretasi yang lebih inklusif dan memperjuangkan kesetaraan gender.³⁴ Hubungan antara agama dan negara juga menjadi sumber kontroversi yang sering diperbincangkan. Beberapa pihak mendorong untuk penerapan hukum syariah secara menyeluruh sebagai dasar sistem hukum negara, sementara yang lain mempertahankan pemisahan antara agama dan negara dalam rangka menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan beragama.³⁵

³³ Ulya, "Post-Truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial," *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 6 No. 2 (2018): 289-93, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v6i2.4070>.

³⁴ Nashriyah, "Perempuan Dalam Pandangan Islam; Antara Idealita Dan Realita," *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* Volume 7 Nomor 2 (2018): 72-74.

³⁵ Ahmad Sadzali, "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 341-75, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>.

Selanjutnya, pendidikan juga menjadi area yang memunculkan kontroversi dalam interpretasi ajaran-ajaran agama Islām di era modern. Beberapa masyarakat Muslim berpendapat bahwa sistem pendidikan harus berfokus pada pemahaman yang lebih luas dan inklusif terhadap pengetahuan dan ilmu pengetahuan modern, sementara yang lain menekankan pentingnya mempertahankan akar tradisional dan pendekatan konservatif dalam pendidikan Islām. Kontroversi semacam ini sering muncul dalam debat mengenai kurikulum sekolah, metode pengajaran, serta pemahaman terhadap sains dan teknologi dalam Islām. Pemikir yang mengusulkan pendekatan yang inklusif dan memadukan nilai-nilai Islām dengan nilai-nilai universal, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keaslian dan pemisahan dari pengaruh Barat harus diutamakan.³⁶ Selain itu, ada pula perdebatan tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam interpretasi agama Islām di era modern. Beberapa ulama dan pemikir Muslim memandang bahwa Islām memberikan jaminan kebebasan beragama yang luas, sementara yang lain menganggap bahwa interpretasi yang lebih kaku dan otoriter diperlukan untuk melindungi nilai-nilai agama dan masyarakat Muslim. Pandangan-pandangan tersebut merupakan perbedaan dalam menginterpretasikan penafsiran teks agama.³⁷

Fundamentalisme dan radikalisme dalam konteks agama Islām merupakan pandangan dan gerakan yang teguh memegang prinsip-prinsip keagamaan secara literal (tekstualis). Kelompok fundamentalis dan radikal cenderung menganggap al-Qur'an dan hadis sebagai landasan ajaran Islām yang tidak memerlukan interpretasi atau penafsiran lainnya. Dalam beberapa perkembangan terkini, terdapat indikasi-indikasi bahwa kelompok fundamentalis juga menjadi basis bagi penganut radikalisme. Kelompok fundamentalis modern ini menjadikan dakwah (penyebaran ajaran agama) sebagai misi utama mereka, sementara kelompok radikal modern lebih fokus pada misi jihad. Dari segi ini, dapat dipahami bahwa kelompok radikalisme memiliki corak pemikiran yang lebih ekstrim daripada kelompok fundamentalis dalam

³⁶ Moh Mizan Habibi, "Corak pendidikan islam inklusif," *eL-Tarbawi* 10, no. 1 (2017): 44–47.

³⁷ Ngainun Naim, "Islam dan HAM: perdebatan mencari titik temu," *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (21 Januari 2016): 100, <https://doi.org/10.18326/ijtiHAD.v15i1.83-102>.

upaya memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran agama. Keberadaan kelompok fundamentalis dan radikal dalam masyarakat masa kini, termasuk di Indonesia, tidak dapat diabaikan karena mereka merupakan salah satu komponen dari masyarakat Muslim yang berpegang teguh pada agama. Fundamentalisme dan radikalisme Islām dalam konteks modern dapat dilihat sebagai gerakan yang berfokus pada penantangan terhadap Barat. Selain itu, ada juga kelompok yang memiliki corak fundamentalis dan radikal, namun tidak secara langsung menantang/ menolak terhadap Barat, melainkan berusaha untuk menerapkan syariat Islām di suatu negara.³⁸

Islām dan Konsep Alternative Modernities

Alternative Modernities mengacu kepada sebuah gagasan, yang menyampaikan bahwa modernitas muncul melalui proses adaptasi, transformasi, dan inovasi budaya yang berbeda dengan modernitas Barat. Konsep ini menekankan bahwasanya modernitas tidak hanya terbatas pada model Barat, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk modernitas yang muncul melalui interaksi dengan modernitas lain dan melalui adaptasi budaya.³⁹ Konsep ini merujuk pada pendekatan yang mengakui dan mengeksplorasi berbagai bentuk modernitas di luar konsep modernitas yang dominan serta timbul dari tradisi Barat.⁴⁰ Alternative Modernities menyoroti keragaman budaya, perspektif, dan pengalaman dalam konteks modernitas di berbagai lokasi nasional dan budaya di seluruh dunia. Pendekatan ini bertujuan untuk melampaui pandangan yang memandang modernitas hanya sebagai fenomena Barat, dan mencari perspektif yang lebih inklusif dan beragam dalam pemahaman modernitas.⁴¹

Alternative Modernities ini muncul melalui penggunaan kembali unsur-unsur budaya modern Barat dalam bentuk material, diskursif, sosial dan etis dengan melibatkan transformasi budaya lokal dan adaptasi terhadap modernitas. Alternative Modernities juga melibatkan kritik terhadap dominasi Barat dalam konsep modernitas, serta berusaha mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan yang terkait dengan modernitas yang dominan. Pendekatan ini mengakui bahwa modernitas tidak

³⁸ M Abduh Wahid, "Fundamentalisme Dan Radikalisme Islam" 12 (2018): 63-72.

³⁹ Bill Ashcroft, "Alternative Modernities: Globalization and the Post-Colonial," t.t., 21-22.

⁴⁰ Dilip Parameshwar Gaonkar, *On Alternative Modernities* (Durham: Duke University Press, 2001), 14-15.

⁴¹ Dilip Parameshwar Gaonkar, 13-15.

terbatas pada satu bentuk tunggal, melainkan dapat mengambil berbagai bentuk yang mencerminkan keragaman budaya dan pengalaman di seluruh dunia. *Alternative Modernities* bukanlah penolakan terhadap modernitas Barat, melainkan bentuk modernitas yang berbeda dari westernisasi. Konsep ini menekankan bahwa modernitas itu sendiri dapat berubah dan berkembang melalui interaksi dengan budaya lain dan melalui proses adaptasi, transformasi dan inovasi. Modernitas alternatif juga menyoroti pentingnya melihat modernitas sebagai fenomena yang terkait dengan konteks budaya dan peradaban tertentu. Modernitas bukan hanya hasil dari perkembangan sejarah, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Budaya yang berbeda memiliki titik awal yang berbeda dalam transisi menuju modernitas dan mengarah pada hasil yang berbeda.⁴²

Konsep ini muncul sebagai respons terhadap dominasi konsep modernitas yang berakar dari tradisi Barat. Dalam konteks globalisasi dan intensifikasi interaksi budaya, perhatian terhadap kontribusi dan pengalaman budaya lain dalam perkembangan modernitas semakin penting. Konsep ini juga merupakan hasil kritik terhadap pandangan yang menganggap modernitas hanya sebagai fenomena Barat. Pemikiran terkait konsep ini dipengaruhi oleh pemikiran kritis terhadap modernitas yang ada. Beberapa teori kritis, seperti post kolonialisme, feminisme, dan teori kritis rasial, telah menyoroti ketimpangan dan ketidakadilan yang terkait dengan modernitas dominan. Hal ini yang kemudian mendorong pengembangan perspektif alternatif yang berupaya mengatasi ketimpangan tersebut dan mengembangkan pandangan yang inklusif dan trans nasional. Selain itu, kemajuan teknologi dan komunikasi telah membuka ruang bagi pertukaran ide dan pengalaman antarbudaya yang lebih luas. Konteks ini memicu pengembangan konsep modernitas alternatif sebagai upaya untuk melampaui pandangan yang sempit dan mengakui keragaman budaya dalam konteks modernitas.⁴³ Selain itu, kemunculan konsep ini merupakan keinginan untuk mengeksplorasi dan mengakui keberagaman budaya dan perbedaan dalam pemahaman spiritual, moral, dan budaya yang muncul dalam proses modernisasi. Konsep ini merujuk pada pemikiran Charles Taylor yang mana ia

⁴² Dilip Parameshwar Gaonkar, 13–15.

⁴³ Dilip Parameshwar Gaonkar, 13–15.

menantang gagasan bahwa hanya ada satu model dominan modernitas dan bahwa semua budaya harus menjadi seperti budaya Barat. Taylor berpendapat bahwa transisi menuju modernitas dapat mengambil jalur yang berbeda dan menghasilkan hasil yang beragam, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan sosial yang unik.⁴⁴ Selain beberapa hal tersebut, konsep ini juga menawarkan beberapa hal baru diantaranya:

Pengakuan terhadap pluralitas budaya dan perbedaan dalam ide-ide spiritual, moral, dan budaya yang timbul dalam proses modernisasi. Pluralisme budaya adalah konsep yang mengacu pada pengakuan, penerimaan, dan sikap terhadap keanekaragaman suatu bangsa, suku bangsa, atau latar belakang kebudayaan yang menjadi ciri dari masyarakat majemuk (plural). Konsep pluralisme ini telah dikenal dalam kajian-kajian sosiologi, antropologi, dan studi agama sebelum konsep multikulturalisme muncul. Konsep ini antara lain sebagai berikut:

1. Penolakan terhadap gagasan bahwa hanya ada satu model modernitas yang dominan dan bahwa semua budaya harus mengadopsi model budaya Barat.
2. Pemahaman bahwa transisi menuju modernitas dapat mengambil berbagai jalur yang beragam, tergantung pada konteks sejarah, budaya, dan sosial yang unik.
3. Mendukung ruang bagi keberagaman budaya yang dalam, termasuk perbedaan dalam pemahaman tentang identitas individu, masyarakat, alam, dan konsepsi tentang kebaikan.
4. Menekankan pentingnya alternative spiritual dan moral, serta keinginan untuk memiliki visi yang berbeda tentang kebaikan dan bentuk identifikasi diri.
5. Mengakui perbedaan dalam norma tindakan dan bentuk hukum yang muncul seiring dengan proses modernisasi, termasuk hak asasi manusia.⁴⁵

Kemudian, dalam perkembangannya, konsep ini telah dikaji oleh banyak akademisi, beberapa dari mereka memberikan perspektif baru terkait konsep Alternative Modernities ini, antara lain Dipesh Chakrabarty, yang merupakan seorang sejarawan dan teoretikus post kolonial menyatakan bahwa modernitas politik tidak

⁴⁴ Thomas Mccarthy, *On Reconciling Cosmopolitan Unity And National Diversity* (Durham: Duke University Press, 2001), 232.

⁴⁵ Thomas Mccarthy, 220–30.

dapat dipahami di mana pun di dunia tanpa mengaitkannya dengan kategori dan konsep yang berasal dari tradisi intelektual dan teologis Eropa. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mengakui bahwa modernitas dapat berkembang melalui hubungan dengan budaya-budaya lainnya serta melalui proses adaptasi budaya. Beliau berpendapat bahwa *Alternative Modernities* memungkinkan untuk melihat modernitas dari perspektif yang berbeda dan menghindari dominasi wacana Barat tentang modernitas.

Selain Dipesh Chakrabarty, Dilip Gaonkar, yang merupakan seorang teoretikus budaya. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mendukung konsep *Alternative Modernities* ini dengan menekankan pentingnya adaptasi budaya yang kreatif dalam menciptakan bentuk-bentuk modernitas yang sesuai dengan kebutuhan dan identitas lokal. Beliau berpendapat bahwa adaptasi budaya bukan hanya tentang menyesuaikan bentuk atau merekam praktik, tetapi juga tentang tempat di mana suatu kelompok "membuat" diri mereka modern dan memberikan identitas dan takdir bagi diri mereka sendiri. Arjun Appadurai, yang juga mendukung konsep *Alternative Modernities* dan menekankan pentingnya melihat modernitas sebagai fenomena yang melintasi batas-batas budaya dan nasional. Beliau berpendapat bahwa *Alternative Modernities* mengakui pluralitas pengalaman modernitas di berbagai konteks budaya.⁴⁶

Walter Mignolo juga menekankan pentingnya memahami modernitas sebagai hasil dari interaksi dan pertukaran antara berbagai budaya dan masyarakat. Beliau berpendapat bahwa *Alternative Modernities* mengakui bahwa ada banyak cara yang berbeda untuk mengalami dan menginterpretasikan modernitas. Frederick Cooper, merupakan seorang sejarawan, mengajukan pertanyaan kritis tentang apakah *Alternative Modernities* seharusnya disebut sebagai modernitas. Beliau berpendapat bahwa jika setiap bentuk inovasi menghasilkan modernitas, maka istilah tersebut kehilangan makna analitis. Namun, dia juga mengakui bahwa modernitas itu sendiri dapat berubah dan berkembang melalui adaptasi budaya yang kreatif.⁴⁷

Charles Taylor, ia menyoroti pentingnya melihat modernitas dalam konteks budaya dan peradaban tertentu. Beliau berpendapat bahwa modernitas tidak hanya

⁴⁶ Dilip Parameshwar Gaonkar, *On Alternative Modernities*, 1-15.

⁴⁷ Ashcroft, "Alternative Modernities: Globalization and the Post-Colonial," 87-88.

muncul sebagai hasil perkembangan sejarah, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya. Taylor menekankan bahwa melihat modernitas secara akultural akan mengabaikan perbedaan budaya yang mempengaruhi cara budaya-budaya non-Barat mengintegrasikan fitur-fitur universal modernitas.⁴⁸

Dalam hubungan antara modernitas dan Islām jika ditinjau menggunakan konsep *Alternative Modernities*, hal ini seperti gagasan pemikiran Nurcholis Majdid dalam salah satu bukunya yang berjudul “Islām, Kemodernan, dan Keindonesiaan”. Dalam salah satu sub bab karyanya, beliau menulis tentang “Modernisasi Ialah Rasionalisasi Bukan Westernisasi” modernitas dalam konteks Islām mengacu pada pengertian modernisasi yang rasional, ilmiah, dan sesuai dengan hukum alam yang berlaku. Modernitas dipandang sebagai kebutuhan dan kewajiban mutlak dalam Islām. Hal ini karena modernitas mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dan rasional untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang maksimal.⁴⁹

Modernitas dalam pandangan ini melibatkan perubahan pemikiran dan pola kerja irasional dan menggantinya dengan pemikiran dan pola kerja baru yang mengikuti hukum alam. Dalam konteks Islām, modernitas juga terkait dengan penemuan kebenaran relatif dan kemajuan yang berkesinambungan dalam mencapai kebenaran mutlak, yaitu pendekatan kepada Allah Swt sebagai Kebenaran Ilahi. Modernitas dalam Islām mengandung nilai-nilai moral dan agama, serta bermuara pada pembangunan peradaban yang mulia dan kebahagiaan umat manusia. Modernitas dalam Islām menyangkut kesadaran akan peran Tuhan sebagai sumber segala kebenaran dan nilai moral, serta mengakui integrasi antara agama dan kehidupan duniawi.⁵⁰

Dalam diskusi mengenai relevansi Islam dalam kehidupan modern, pemikiran Nurcholis Madjid menjadi sentral karena pendekatannya yang optimis terhadap adopsi nilai-nilai modernitas oleh umat Islam tanpa harus mereduksi identitas keagamaan mereka. Nurcholis Madjid memandang modernitas sebagai fenomena universal yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik, bukan sekadar dominasi budaya Barat.

⁴⁸ Ashcroft, 83–87.

⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), 197–224.

⁵⁰ Madjid, 197–224.

Baginya, modernitas mencakup konsep-konsep seperti demokrasi, masyarakat sipil, hak asasi manusia, pluralisme, dan teknologi, yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks Islam. Nurcholis Madjid menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi untuk berinovasi dan mengadopsi nilai-nilai modernitas tanpa mengorbankan nilai-nilai inti dalam keagamaan. Beliau mengilustrasikan bahwa modernitas tidak hanya terbatas pada pengaruh Barat, seperti yang terlihat dari keberhasilan Jepang dalam mencapai modernitas tanpa sepenuhnya mengadopsi budaya Barat. Hal ini kemudian menegaskan bahwa modernitas dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk budaya dan agama, termasuk Islam.⁵¹

Selain itu, Nurcholis Madjid membedakan antara modernitas (sebagai kondisi perkembangan sosial-ilmiah) dan modernisme (sebagai gerakan intelektual Barat). Baginya, umat Islam perlu menerima modernitas sebagai tantangan dan peluang untuk berkontribusi secara positif dalam dunia kontemporer tanpa harus mengadopsi modernisme. Dalam pandangannya, zaman modern memiliki paralel dengan nilai-nilai yang telah ada dalam Islam klasik, seperti kosmopolitanisme, semangat berperhitungan (*calculative*), dan penekanan pada kebebasan serta inisiatif pribadi. Dalam konteks ini, kesadaran akan hubungan antara modernitas dan Islam yang otentik menjadi penting untuk disebarakan di kalangan umat Muslim. Hal ini tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri umat Muslim dalam menghadapi tantangan modernisasi dan teknikalisisasi, tetapi juga untuk memberi mereka landasan historis yang kuat dalam merespons perkembangan zaman. Dengan demikian, umat Muslim dapat lebih berdaya dalam memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif bagi masyarakat global yang semakin terhubung ini. Pemikiran Nurcholis Madjid ini kemudian menyoroti pentingnya dialog antara tradisi Islam dan tuntutan-tuntutan modernitas sebagai bagian dari upaya untuk mencapai harmoni dan kemajuan dalam masyarakat global saat ini.⁵²

⁵¹ Budhy Munawar, "Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan Dan Kemodernan," 2019, 990-994.

⁵² Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: pemikiran Islam di kanvas peradaban* (Paramadina [bekerjasama dengan] Center for Spirituality and Leadership [dan] Mizan, 2006), 3640-3641, [//pustaka.kemdikbud.go.id%2F%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27557](http://pustaka.kemdikbud.go.id%2F%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27557).

Gagasan lainnya juga disampaikan oleh Muhammad Iqbal dalam karyanya yang berjudul “The Reconstruction of Religious Thought in Islām”. Dalam sub bab “The Principle of Movement in the Structure of Islām” Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa dalam konteks Islām, modernitas diartikan sebagai proses pembaharuan dan transformasi dalam pemikiran dan praktik Islām. Termasuk dalam hal ini ialah reformasi dalam hal interpretasi dan penerapan hukum Islām dengan memahami prinsip-prinsip hukum secara mendalam dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat modern. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman dan kritis terhadap hadis Nabi Muhammad Saw dengan memperhatikan konteks sejarah dan memisahkan antara hadis yang memiliki relevansi hukum dan yang tidak.⁵³

Proses ini juga melibatkan pengembangan dan penggunaan konsep ijma’ (konsensus). Modernitas dalam Islām tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh Barat, tetapi melibatkan reformasi internal berdasarkan prinsip-prinsip Islām yang otentik. Dalam hal ini termasuk reformasi hukum, sosial, politik dan ekonomi yang sejalan dengan nilai dan prinsip Islām. Modern dalam Islām menggabungkan nilai-nilai universal Islām dengan konteks dan kebutuhan masyarakat modern, dengan penekanan pada kesetaraan, kebebasan, persatuan dan keadilan. Dalam mencapai modernitas dalam Islām, penting untuk melestarikan akar dan prinsip fundamental Islām, dengan melibatkan kritik, adaptasi, dan reformasi yang cerdas. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai universal Islām dan kesadaran akan perubahan dan transformasi yang diperlukan untuk mencapai kemajuan sosial dan spiritual dalam konteks zaman modern.⁵⁴

Gagasan serupa juga dilontarkan oleh Fazlur Rahman yang merupakan seorang cendekiawan Muslim terkemuka asal Pakistan. Beliau aktif dalam bidang teologi Islām dan pemikiran modernis. Dalam karyanya yang berjudul “Islām and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition” Fazlur Rahman mengemukakan bahwa modernisasi dapat terjadi dalam konteks budaya Islām tanpa harus mengadopsi

⁵³ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (London: Oxford University Press, 1934), 250.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, 202.

sepenuhnya nilai-nilai Barat. Beliau berpendapat bahwa modernisasi sejatinya merupakan sebuah proses yang memungkinkan masyarakat Muslim mengambil manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan sosial yang telah dicapai oleh dunia Barat, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai inti Islām. Menurutnya, modernisasi adalah usaha para tokoh muslim untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dan westernisasi yang berlangsung di dunia Islām.⁵⁵

Fazlur Rahman mengartikan modernitas dalam konteks yang lebih luas daripada sekadar kemajuan teknologi atau ekonomi. Menurutnya, modernitas mencakup transformasi menyeluruh dalam nilai-nilai, institusi sosial, dan pandangan terhadap keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. Beliau mengemukakan bahwa modernitas tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup perubahan dalam pendidikan, pandangan terhadap pekerjaan, serta reformasi sosio-moral yang mendalam. Pemikiran Fazlur Rahman kemudian menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai Islam dengan tuntutan-tuntutan zaman modern, sehingga menciptakan sebuah masyarakat yang tidak hanya maju secara material tetapi juga etis dan berkeadilan. Selain itu, Fazlur Rahman juga mengemukakan pandangan bahwa konsep modernitas tidak harus selalu merujuk kepada Barat secara eksklusif. Baginya, modernitas melibatkan adaptasi nilai-nilai universal yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim. Beliau menyoroti pentingnya masyarakat Muslim mengembangkan model modernitas mereka sendiri dan tidak hanya mengadopsi teknologi serta sistem ekonomi Barat, akan tetapi juga tetap mempertahankan identitas budaya dan spiritual mereka sebagai Masyarakat Muslim.⁵⁶

C. Penutup

Dalam era peradaban modern, Islām memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dalam

⁵⁵ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, trans. oleh Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1982), 181.

⁵⁶ Fazlur Rahman, "Islamic modernism: Its scope, method and alternatives," *International Journal of Middle East Studies* 1, no. 4 (1970): 320–21.

politik, konsep politik Islām mendorong partisipasi aktif umat Muslim dalam pemerintahan dan mempromosikan keadilan sosial serta sistem pemerintahan yang baik. Dalam ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi Islām seperti keadilan, larangan riba, dan keadilan distribusi kekayaan dan pemberian panduan dalam praktik ekonomi umat Muslim menjadi salah satu sumbangsih Islām dalam peradaban modern. Selain itu, di era modern ekonomi Islām juga terdapat lembaga keuangan Islām seperti bank syariah dan pasar modal syariah telah menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islām. Dalam ilmu pengetahuan, Islām memiliki warisan intelektual yang kaya, terutama melalui kemajuan dalam ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu aqliyyah. Perkembangan tersebut terjadi melalui gerakan terjemahan naskah-naskah klasik ke dalam bahasa Arab serta melalui kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.

Namun, dalam perkembangan peradaban modern, Islām juga menghadapi berbagai tantangan dan problematika. tantangan tersebut meliputi, dampak globalisasi, terutama melalui media sosial, membawa konsekuensi negatif seperti penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian terhadap umat Muslim. Interpretasi kontroversial terhadap ajaran agama, kelompok ekstremisme dan fundamentalisme, serta perdebatan tentang peran perempuan, hubungan agama dan negara, pendidikan, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia juga menjadi masalah yang dihadapi oleh Islām dalam era modern. Dalam konteks *Alternative Modernities*, Islām menawarkan pemahaman modernitas yang rasional, ilmiah, dan sesuai dengan hukum alam yang berlaku, sambil mempertahankan nilai-nilai moral dan agama. Reformasi pemikiran dan praktik Islām, termasuk interpretasi hukum yang lebih dalam dan kritis, pemahaman konteks sejarah dalam pemahaman hadis, serta pengembangan konsep seperti *ijma'*, menjadi bagian dari modernitas dalam Islām. Konsep *Alternative Modernities* juga mendorong pengakuan terhadap kontribusi budaya lain dalam perkembangan modernitas dan menghargai keragaman budaya dalam konteks modernitas. Beberapa pemikir Islām seperti Nurcholis Majdid, Muhammad Iqbal, dan Fazlur Rahman telah memberikan kontribusi dalam memahami *Alternative Modernities* dalam Islām. Mereka menekankan pentingnya adaptasi budaya yang

kreatif, reformasi internal berdasarkan prinsip-prinsip Islām yang otentik, serta harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi dalam dunia Islām.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, M. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islām*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Ashcroft, Bill. "Alternative Modernities: Globalization and the Post-Colonial," t.t.
- Auliya, Nisa, dan Pujawati Pujawati. "Dampak Positif dan Negatif Globalisasi Terdapat Peran Keagamaan di Tengah Masyarakat Kontemporer." *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies* 2, no. 2 (27 Desember 2023): 119–28. <https://doi.org/10.59029/int.v2i2.22>.
- Azzahra, Nova, Rahma Dania, Ratri Syawalina, dan Revalina Ayunda. "Kontribusi Islām dalam Pengembangan Peradaban Dunia." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2 Februari 2024): 1763–70. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11913>.
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Dilip Parameshwar Gaonkar. *On Alternative Modernities*. Durham: Duke University Press, 2001.
- Direktorat PLP Dirjen Dikdasmen Depdiknas. *KBBI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effat al Sharqawi. *Filsafat Kehidupan Islām*. Bandung: Pustaka, 1986.
- Habibi, Moh Mizan. "CORAK PENDIDIKAN ISLĀM INKLUSIF," 2017.
- Harun Nasution. *Pembaharuan Dalam Islām*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Hasan Asari. *Sejarah Islām Modern: Agama Dalam Negosiasi Historis Sejak Abad XIX*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Hasyjimy, A. *Sejarah Peradaban Islām*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Huda, Muhammad Nurul. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islām Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah." *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 2 (4 April 2021): 135–48. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>.
- Ishomuddin. "PEMAHAMAN POLITIK ISLĀM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN PARTAI POLITIK BERASAS ISLĀM DI MALANG RAYA." *Humanity* Volume 8, Nomor 2 (2015). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2097>.
- Iskandar Engku, Siti Zubaidah. *Sejarah Pendidikan Islāmi*. Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2016.
- Kamil, Sukron. "Is Islām Compatible with Modernity? An Analysis of Modernity as Modern Civilization." *Sunan Kalijaga: International Journal of Islāmic Civilization* 3, no. 1 (17 Desember 2020): 1. <https://doi.org/10.14421/skijic.v3i1.1467>.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Madjid, Nurcholish. *Islām Kemoderenan Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Mudhiyah, Kharidatul. "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islām Masa Klasik" 8, no. 2 (2015).

- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. *Sistem Politik Islām Terj. Al-Nizam al-Siyasi Fiy al-Islām*. Jakarta: Rabbani Press, 2000.
- Muhammad Iqbal. *The Reconstruction of Religious Thought in Islām*. London: Oxford University Press, 1934.
- Mumtazinur. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2019.
- Munawar, Budhy. "Karya Lengkap Nurcholish Madjid, Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan," 2019.
- . *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: pemikiran Islam di kanvas peradaban*. Paramadina [bekerjasama dengan] Center for Spirituality and Leadership [dan] Mizan, 2006.
[//pustaka.kemdikbud.go.id%2F%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27557](http://pustaka.kemdikbud.go.id%2F%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D27557).
- Naim, Ngainun. "Islām dan HAM: perdebatan mencari titik temu." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islām dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (21 Januari 2016): 83.
<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.83-102>.
- Nashriyah. "PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLĀM; ANTARA IDEALITA DAN REALITA." *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islām serta Perlindungan Anak* Volume 7 Nomor 2 (2018).
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islām*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- . *Studi Islām komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurfazillah. "PRAKTIK POLITIK DALAM SEJARAH ISLĀM ERA DINASTI-DINASTI ISLĀM." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 6, no. 1 (30 Oktober 2020): 43–62. <https://doi.org/10.22373/jai.v6i1.615>.
- Philip K. Hitti. *History Of The Arabs: Rujukan Induk Dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islām*. Diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin Dan Dedi Slamet Riyadi. Jambi: Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islām (P3ei). *Ekonomi Islām*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011. Habibi, Moh Mizan. "Corak pendidikan islam inklusif." *eL-Tarbawi* 10, no. 1 (2017).
- Rahman, Fazlur. "Islamic modernism: Its scope, method and alternatives." *International Journal of Middle East Studies* 1, no. 4 (1970): 317–33.
- . *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, trans. oleh Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1982
- Rahbaran, Homayon, Rashid Rekabian, dan Sirous Khandan. "COMPONENTS OF MODERN ISLĀMIC CIVILIZATION IN THE THOUGHT OF AYATOLLAH KHAMENEI." *Gênero & Direito* 9, no. 2 (24 Februari 2020).
<https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2020v9n2.50783>.
- Sadzali, Ahmad. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 341–75. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.341-375>.
- Samuel P. Huntington. *The Clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order*. New York: Simon & Schuster, 1996.
- Santoso, Sugeng. "SEJARAH EKONOMI ISLĀM MASA KONTEMPORER." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (5 Oktober 2016): 59–86.
<https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>.

- S.I. Poeradisastra. *Sumbangan Islām Kepada Ilmu Dan Peradaban Modern*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat, 1986.
- Sodiqin, Ali. "KULTUR POLITIK ISLĀM DALAM LINTASAN SEJARAH," t.t.
- Sujati, Budi. "Sejarah Perkembangan Globalisasi dalam Dunia Islām." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islām* 2, no. 2 (31 Desember 2018): 98. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.969>.
- Thomas Mccarthy. *On Reconciling Cosmopolitan Unity And National Diversity*. Durham: Duke University Press, 2001.
- Ulya. "Post-Truth, Hoax, dan Religiusitas di Media Sosial." *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* Vol. 6 No. 2 (2018). <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v6i2.4070>.
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan. *Tarbiyah Syiasyah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*,. Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Wahid, M Abduh. "FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME ISLĀM" 12 (2018).
- XIX-XX, Abad. "MOTIVASI KEBANGKITAN DUNIA ISLĀM PADA ABAD XIX-XX," no. 1 (2015).